

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembanguna di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara :

- a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi yang mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi :
 1. Pengembangan kebijakan kepemiluan
 2. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang keras
 3. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis
 4. Peningkatan kapasitas lembaga pemilu
 5. Fasilitasi peningkatan peran parpol
 6. Penguatan dan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
 7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah
 8. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi
 9. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebaga bagian lembaga penyelengga pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog
 - Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi :
 1. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu
 2. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi
 3. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem keptraian dan sistem presidensial.



- b. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi :
 1. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern instansi pemerintah
 2. Penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional
 3. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada instansi pusat dan daerah
 - Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi, yang dilaksanakan melalui strategi :
 1. Penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government
 2. Penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi
 3. Penyempurnaan /penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik
 4. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK
 - Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yang ditempuh melalui strategi:
 - Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara
 - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik
 - Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D
 - Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik
 - Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik
 - Diterbitkannya Standart Operating Procedure (SOP) layanan publik
 - Pengelolaan sistem dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional
 - Penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia

- c. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis yang ditempuh melalui strategi :
 1. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah
 2. Penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyerdahaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal
 3. Penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah
 - Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh melalui strategi :
 1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional
 2. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara
 3. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah
 4. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional
 - Penerapan manajemen Aparatur Negara Sipil (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:
 1. Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembanguna dan instansi
 2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan dan kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
 3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat
 4. Penerapan sistem promosi secara terbuka kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh semakin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
 5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai
 6. Penguatan sistem informasi dan kepegawaian nasional
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi :
 1. Memastikan implementasi UU nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik secara konsisten.
 2. Mendorong inovasi pelayanan publik.
 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
 4. Penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Mengacu pada arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai instansi induk seluruh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menguraikan arah kebijakan dan strategi melalui ilustrasi peta strategi sebagai berikut :

